

EFEKTIVITAS+MUSYAWARAH+R RENCANA+KERJA+PEMERINTAH+ DESA.doc

by Jurnal Mediasosian

Submission date: 16-Jan-2025 09:52AM (UTC+0700)

Submission ID: 2565027386

File name: EFEKTIVITAS_MUSYAWARAH_RENCANA_KERJA_PEMERINTAH_DESA.doc (98.5K)

Word count: 3854

Character count: 27486

**1
EFEKTIVITAS MUSYAWARAH RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DALAM MENYUSUN PRIORITAS USULAN PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN WAJO**

*Muhammad Aris¹⁾

1)Universitas Puangrimaggalatung Sengkang, Indonesia

*Email Korespondensi : arismuhammad20041986@gmail.com

**5
Abstrak**

Dalam menyusun perencanaan pembangunan di tingkat desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) dalam menyusun prioritas usulan pembangunan di Kabupaten Wajo serta strategi yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas musyawarah RKP-Desa tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa musyawarah RKP-Desa sudah cukup efektif dalam menyusun prioritas usulan pembangunan di Kabupaten Wajo, meskipun masih terdapat kendala terkait partisipasi masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Strategi yang efektif untuk meningkatkan efektivitas musyawarah RKP-Desa adalah melakukan pertemuan di tingkat bawah dengan kelompok masyarakat melalui kearifan lokal *tudang sipulung*.

Kata Kunci: Efektivitas; perencanaan pembangunan desa; partisipasi Masyarakat.

**36
Abstract**

18 preparing development planning at the village level, the village government is obliged to hold development planning deliberations. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) deliberation in prioritizing development proposals in Wajo Regency and the strategies undertaken in increasing the effectiveness of the RKP-Desa deliberation. This research is a qualitative research with data collection techniques through observation, interviews, and literature study. The data analysis technique was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification. The results of the study revealed that the RKP-Desa deliberation was quite effective in prioritizing development proposals in Wajo Regency, although there were still obstacles related to community participation that still needed to be improved. An effective strategy to increase the effectiveness of the RKP-Desa deliberations is to hold meetings at the grassroots level with community groups through the local wisdom of *tudang sipulung*.

Keywords: Effectiveness; village development planning; community participation.

PENDAHULUAN

43

Pembangunan desa di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁹ Dalam konteks ini, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) menjadi instrumen kunci. RPJM Desa merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang disusun setiap enam tahun sekali, sementara RKP-Desa adalah dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk menjabarkan RPJM Desa ke dalam rencana kerja konkret yang dapat dieksekusi setiap tahunnya (Roza & Arliman, 2018).

5

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan desa harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Pendekatan ini dikenal dengan istilah **bottom-up planning**, yang bertujuan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat menjadi acuan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan desa (Rahmawati, 2015). Masyarakat desa diharapkan berperan aktif dalam setiap tahapan proses, mulai dari identifikasi kebutuhan, pengusulan program, hingga pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan. Namun, kenyataannya, pelaksanaan proses perencanaan ini menghadapi sejumlah kendala.

Dalam praktiknya, banyak masyarakat yang hadir dalam musyawarah hanya untuk memenuhi undangan, tanpa memberikan kontribusi berupa usulan atau masukan. Hal ini terjadi karena masyarakat sering kali tidak memahami pentingnya peran mereka dalam proses ini. Selain itu, usulan yang diajukan masyarakat tidak selalu didasarkan pada analisis kebutuhan yang komprehensif. Sebagian besar usulan lebih mencerminkan kepentingan individu atau kelompok tertentu, sehingga sulit menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar mendesak. Forum musyawarah juga sering kali kurang efektif dalam menciptakan diskusi yang konstruktif. Ketimpangan partisipasi antar kelompok masyarakat juga menjadi masalah, di mana kelompok marginal, seperti perempuan dan kaum muda, sering kali kurang terwakili. Tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal pelibatan

masyarakat dalam perencanaan pembangunan dengan realitas di lapangan (Melis et al., 2016).

Dalam konteks Kabupaten Wajo, pelaksanaan musyawarah RKP-Desa telah dilakukan dengan mengacu pada ⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Musyawarah ini menjadi forum penting yang memungkinkan pemerintah desa dan masyarakat menyepakati prioritas ³² program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam ³³ satu tahun anggaran. Musyawarah ini juga menjadi wadah untuk mengevaluasi pelaksanaan RKP-Desa tahun sebelumnya, sehingga ³¹ dapat dijadikan dasar untuk menentukan langkah-langkah strategis ke depan. ³⁴ Dalam proses ini, dokumen RPJM Desa berfungsi sebagai pedoman utama yang memastikan bahwa usulan yang diajukan ⁴⁵ sesuai dengan visi, misi, dan rencana jangka panjang desa. Selain itu, hasil musyawarah ²⁸ menjadi dasar bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sehingga keterlibatan masyarakat dalam proses ini sangat penting (Nur Fitrah, 2019).

Namun, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, efektivitas musyawarah RKP-Desa dalam menyusun prioritas pembangunan di Kabupaten Wajo masih perlu ditingkatkan. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan partisipasi masyarakat, rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya musyawarah desa, serta kurangnya sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan. Sebagian besar masyarakat belum memahami pentingnya peran mereka dalam proses ini, sehingga kurang aktif dalam menyampaikan usulan atau berkontribusi dalam diskusi. Bahkan, beberapa masyarakat hanya hadir untuk memenuhi undangan tanpa memberikan masukan yang berarti. Dalam hal ini, rendahnya keterlibatan masyarakat menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan musyawarah yang efektif (Melis et al., 2016).

Efektivitas pelaksanaan musyawarah RKP-Desa sangat bergantung pada sinergi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Sinergi ini akan mendorong pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Sayangnya, sebagaimana diungkapkan oleh penelitian ini, tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Wajo

masih rendah. Banyak masyarakat yang enggan berpartisipasi karena kurang memahami pentingnya peran mereka dalam proses perencanaan pembangunan desa. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi faktor yang turut memengaruhi keterlibatan mereka dalam musyawarah. Selain itu, forum musyawarah sering kali kurang efektif dalam menciptakan diskusi yang konstruktif, karena minimnya fasilitasi yang baik dari pemerintah desa serta terbatasnya data dan informasi yang dapat dijadikan acuan dalam diskusi.

Di sisi lain, salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan musyawarah RKP-Desa adalah menentukan skala prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam banyak kasus, usulan yang diajukan masyarakat lebih mencerminkan ¹⁶ kepentingan individu atau kelompok tertentu dibandingkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menyulitkan pemerintah desa dalam menyusun rencana pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk tenaga maupun informasi, menjadi kendala tambahan yang harus diatasi.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan berbagai strategi yang ⁴¹ dapat meningkatkan efektivitas musyawarah RKP-Desa di Kabupaten Wajo. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah melalui kearifan lokal **tudang sipulung**. Tradisi ini memungkinkan masyarakat berdiskusi secara informal di tingkat RT atau RW sebelum musyawarah RKP-Desa dilaksanakan. Melalui tudang sipulung, kelompok-kelompok masyarakat yang jarang terlibat, seperti kelompok perempuan dan kelompok pemuda, dapat lebih aktif berpartisipasi. Selain itu, pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi yang intensif untuk ¹³ meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya musyawarah RKP-Desa. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti pertemuan warga, brosur, dan media sosial. Dalam sosialisasi ini, masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang skala prioritas pembangunan serta dampak positif yang dapat mereka rasakan jika usulan mereka diakomodasi dalam RKP-Desa.

⁴⁰ Penguatan kapasitas aparatur desa juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas musyawarah. Aparatur desa, termasuk perangkat desa dan

pendamping desa, perlu diberikan pelatihan memadai untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memfasilitasi musyawarah. Dengan fasilitasi yang baik, forum musyawarah dapat menjadi lebih efektif dalam menghasilkan keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas. Selain itu, representasi kelompok marginal, seperti perempuan, pemuda, dan kelompok minoritas lainnya, perlu ditingkatkan dalam musyawarah RKP-Desa. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan kuota keterwakilan dalam forum musyawarah, serta memberikan dukungan bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Efektivitas musyawarah RKP-Desa di Kabupaten Wajo memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan desa secara keseluruhan. Sebagaimana dikemukakan oleh Toar et al. (2019), keberhasilan pembangunan desa akan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat desa harus menjadi prioritas utama. Dengan memperkuat efektivitas musyawarah RKP-Desa, pemerintah desa dapat memastikan bahwa program-program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan akan menciptakan rasa memiliki yang lebih besar, sehingga meningkatkan keberlanjutan program-program yang telah direncanakan.

²¹ **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai efektivitas musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) dalam menyusun prioritas usulan pembangunan di Kabupaten Wajo, serta strategi yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengamatan langsung, wawancara, serta analisis dokumen, sehingga hasil penelitian dapat mencerminkan realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Penelitian dilaksanakan selama periode April hingga Oktober 2020 dengan lokasi penelitian di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Wajo memiliki dinamika pembangunan desa yang

relevan dengan isu partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Peneliti memilih beberapa desa sebagai sampel dari zona yang telah ditentukan, dengan kriteria tertentu untuk mencerminkan keberagaman kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat desa. Fokus utama penelitian adalah mengevaluasi sejauh mana musyawarah RKP-Desa efektif dalam menentukan prioritas pembangunan, serta mengidentifikasi kendala dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitasnya.

17

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Observasi digunakan untuk memperoleh data empiris tentang proses pelaksanaan musyawarah RKP-Desa, interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam forum musyawarah. Peneliti mencatat secara detail setiap aktivitas yang terjadi selama musyawarah, termasuk dinamika diskusi, jumlah peserta yang hadir, dan kontribusi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

2

Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait proses penyusunan RKP-Desa. Informan dalam penelitian ini meliputi kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta pendamping desa. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan beberapa warga masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam musyawarah RKP-Desa untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Pertanyaan wawancara disusun secara semi-terstruktur agar memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi tambahan yang relevan selama proses wawancara berlangsung.

38

Studi pustaka dilakukan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Peneliti menganalisis berbagai dokumen terkait, seperti dokumen RKP-Desa, RPJM Desa, dan berita acara musyawarah desa, untuk memahami lebih lanjut prosedur dan hasil perencanaan pembangunan desa. Selain itu, literatur ilmiah, seperti jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, digunakan untuk memberikan landasan teoritis dan memperkaya analisis.

30

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti mengorganisasi data mentah yang telah dikumpulkan untuk memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah diseleksi disajikan dalam bentuk deskripsi naratif yang sistematis untuk mempermudah proses analisis lebih lanjut. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memadukan temuan empiris dari lapangan dengan teori yang digunakan, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan realitas secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memastikan validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode. Dengan triangulasi, keandalan data dapat ditingkatkan, sehingga temuan penelitian lebih kredibel. Selain itu, peneliti juga memperhatikan aspek kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas untuk menjaga kualitas penelitian kualitatif ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini memperkaya kajian tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan efektivitas musyawarah RKP-Desa sebagai instrumen utama dalam menyusun prioritas pembangunan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) di Kabupaten Wajo

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Wajo, ditemukan bahwa pelaksanaan musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) telah cukup efektif dalam menyusun prioritas pembangunan desa. Hal ini terlihat dari hasil musyawarah yang melibatkan masyarakat dalam mengusulkan program-program pembangunan yang dianggap penting. Sebagaimana dijelaskan oleh Camat Tanasitolo dalam wawancara, "Musyawarah RKP-Desa adalah wadah yang memungkinkan

masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, dan sebagian besar program yang diusulkan masyarakat merupakan program yang relevan dengan kebutuhan mereka di desa."

Sekretaris Tokoh Masyarakat Kecamatan Keera juga menambahkan bahwa, "Meskipun tidak semua usulan masyarakat bisa diakomodasi, musyawarah ini memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan mereka. Namun, masyarakat juga perlu memahami bahwa tidak semua kebutuhan dapat didanai melalui anggaran desa." Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas musyawarah tidak hanya diukur dari jumlah usulan yang diterima, tetapi juga dari proses seleksi yang dilakukan berdasarkan skala prioritas dan anggaran yang tersedia.

Musyawarah ini juga telah berhasil menjadi forum evaluasi atas pelaksanaan RKP-Desa tahun sebelumnya. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diwawancara, "Musyawarah ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program tahun lalu, sehingga program yang belum terlaksana atau yang kurang berhasil dapat diperbaiki ke depan."

Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah ini masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Patila, "Banyak masyarakat yang diundang tidak hadir, atau hanya hadir untuk memenuhi undangan tanpa memberikan masukan yang berarti. Tingkat partisipasi sering kali hanya mencapai sekitar 70% dari total undangan yang disebarluaskan." Hasil ini sejalan dengan temuan Melis *et al.* (2016), yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa sering kali rendah akibat kurangnya pemahaman tentang pentingnya musyawarah dan kesibukan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.

Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah

Salah satu indikator keberhasilan musyawarah RKP-Desa adalah tingkat partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa partisipasi masyarakat di Kabupaten Wajo ²⁵ masih kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya jumlah masyarakat yang hadir dalam musyawarah, serta minimnya kontribusi aktif mereka dalam proses diskusi.

Hasil wawancara dengan Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Wajo mengungkapkan bahwa, "Partisipasi masyarakat sering kali bergantung pada pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Jika pemerintah desa aktif mengundang dan memberikan sosialisasi sebelum musyawarah, maka tingkat partisipasi akan meningkat. Sebaliknya, jika sosialisasi kurang, masyarakat cenderung pasif." Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Kasi PMD Kecamatan Tanasitolo, yang menyatakan bahwa, "Partisipasi masyarakat belum maksimal, terutama dalam tahap diskusi. Banyak masyarakat yang hadir, tetapi tidak berani atau enggan untuk menyampaikan usulan mereka."

Selain itu, representasi kelompok marginal, seperti perempuan dan pemuda, dalam musyawarah juga masih rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh pendidik setempat, "Kelompok perempuan dan pemuda sering kali tidak hadir atau tidak berpartisipasi aktif dalam musyawarah. Mereka merasa bahwa usulan mereka tidak akan didengar, sehingga enggan untuk menyampaikan pendapat." Rendahnya representasi kelompok ini menjadi salah satu kelemahan dalam pelaksanaan musyawarah RKP-Desa di Kabupaten Wajo.

Kendala dalam Penyusunan Prioritas Pembangunan

Selain rendahnya partisipasi masyarakat, kendala lain yang ditemukan adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang skala prioritas pembangunan. Banyak masyarakat yang mengusulkan program-program berdasarkan kepentingan individu atau kelompok tertentu, bukan berdasarkan kebutuhan desa secara keseluruhan. Sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Desa Patila, "Sering kali masyarakat mengusulkan program yang sebenarnya bukan prioritas, tetapi lebih kepada kepentingan mereka sendiri. Ini menyulitkan tim penyusun untuk menentukan program mana yang benar-benar menjadi prioritas pembangunan."³⁵

Kendala lain yang ditemukan adalah keterbatasan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan RKP-Desa. Beberapa desa masih menggunakan data lama yang tidak mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pembaruan data terkait kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur desa. Sebagaimana dinyatakan oleh Pendamping Desa Kecamatan Pammana, "Data yang

digunakan dalam penyusunan RKP-Desa sering kali tidak lengkap atau sudah usang, sehingga menyulitkan dalam menentukan prioritas program."

Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah RKP-Desa

Musyawarah RKP-Desa di Kabupaten Wajo telah menunjukkan efektivitas dalam beberapa aspek, seperti memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka dan menjadi forum evaluasi atas pelaksanaan program pembangunan sebelumnya. ²² Sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**, musyawarah ⁱⁿⁱ merupakan instrumen utama untuk memastikan bahwa pembangunan desa berbasis pada kebutuhan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pandangan Rahmawati (2015), yang menyatakan bahwa pendekatan **bottom-up** dalam ³³ perencanaan pembangunan desa memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan.

Namun, efektivitas ini belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal partisipasi masyarakat. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, banyak masyarakat yang hadir dalam musyawarah hanya untuk memenuhi undangan, tanpa memberikan kontribusi aktif. Selain itu, representasi kelompok marginal, seperti perempuan dan pemuda, juga masih rendah. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam pelaksanaan musyawarah, sehingga semua elemen masyarakat dapat terlibat secara maksimal.

Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

³⁴ Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah RKP-Desa, salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah melalui pendekatan **berbasis kearifan lokal**, seperti **tudang sipulung**. Tradisi ini memungkinkan masyarakat untuk berdiskusi secara informal di tingkat komunitas sebelum musyawarah desa dilaksanakan. Melalui tudang sipulung, kelompok-kelompok masyarakat yang jarang terlibat, seperti perempuan dan pemuda, dapat lebih aktif menyampaikan aspirasi mereka. Strategi ini juga dapat membantu mengurangi ketimpangan partisipasi antar kelompok masyarakat, sehingga forum musyawarah menjadi lebih inklusif.

Selain itu, pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi yang intensif tentang pentingnya musyawarah desa. Sebagaimana diungkapkan oleh Liando et al. (2017),

peningkatan pemahaman masyarakat tentang proses perencanaan pembangunan dapat mendorong partisipasi yang lebih besar dalam musyawarah. ¹³ Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti pertemuan warga, brosur, dan media sosial. Dalam sosialisasi ini, masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang skala prioritas pembangunan serta manfaat yang dapat mereka peroleh dari partisipasi aktif dalam musyawarah.

Pentingnya Data yang Akurat

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan musyawarah RKP-Desa adalah kurangnya data dan informasi yang akurat. Data yang digunakan dalam penyusunan RKP-Desa sering kali tidak mencerminkan kondisi aktual di lapangan, sehingga menyulitkan tim penyusun dalam menentukan prioritas program. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola data dan informasi. Penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi berbasis data, dapat membantu pemerintah desa dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara lebih efektif.

Implikasi Pembangunan Desa

Efektivitas musyawarah RKP-Desa memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan desa secara keseluruhan. Sebagaimana dikemukakan oleh ¹² Toar et al. (2019), keberhasilan pembangunan desa akan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat desa harus menjadi prioritas utama. Dengan memperkuat efektivitas musyawarah RKP-Desa, pemerintah desa dapat memastikan bahwa program-program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa musyawarah desa yang efektif mampu menciptakan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga proses pembangunan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan efektivitas musyawarah RKP-Desa perlu terus dilakukan sebagai bagian ²⁰ dari komitmen pemerintah desa untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

11

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) di Kabupaten Wajo telah berjalan cukup efektif dalam menyusun prioritas usulan pembangunan. Musyawarah ini menjadi forum penting yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka terkait pembangunan desa. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas musyawarah, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya musyawarah, serta terbatasnya representasi kelompok marginal, seperti perempuan dan pemuda. Selain itu, keterbatasan data dan informasi aktual juga menjadi hambatan dalam menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Musyawarah RKP-Desa telah mampu menjadi wadah untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan sebelumnya, sekaligus menetapkan program prioritas yang sesuai dengan skala kebutuhan masyarakat. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya kontribusi aktif masyarakat dalam diskusi dan keputusan musyawarah, yang sering kali disebabkan oleh rendahnya tingkat sosialisasi dan pemahaman terhadap pentingnya peran mereka dalam proses pembangunan desa. Kendati demikian, pendekatan yang dilakukan melalui kearifan lokal, seperti tradisi tudang sipulung, telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di beberapa desa.

2

Secara keseluruhan, efektivitas musyawarah RKP-Desa tidak hanya ditentukan oleh pelibatan masyarakat, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah desa dalam mengelola forum musyawarah, menggunakan data yang akurat, serta menciptakan sinergi antara semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan inklusivitas musyawarah RKP-Desa ke depan.

Saran

Adapun saran berdasarkan Kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut:

44

1. Pemerintah desa perlu meningkatkan upaya sosialisasi mengenai pentingnya musyawarah RKP-Desa kepada masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti pertemuan warga, brosur, dan media sosial, dengan tujuan memberikan pemahaman tentang manfaat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Edukasi ini juga harus mencakup penjelasan mengenai skala prioritas pembangunan dan bagaimana usulan masyarakat dapat berkontribusi terhadap pembangunan desa secara keseluruhan.
2. Mene Tradisi lokal seperti tudang sipulung dapat diintegrasikan ke dalam proses musyawarah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Diskusi informal di tingkat RT atau RW sebelum musyawarah RKP-Desa dapat menjadi cara yang efektif untuk menjangkau kelompok-kelompok yang jarang terlibat, seperti perempuan, pemuda, dan kelompok minoritas lainnya. Pendekatan ini juga dapat menciptakan suasana yang lebih inklusif dan mendorong partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat.
3. Untuk memastikan inklusivitas dalam musyawarah, pemerintah desa dapat menetapkan kuota keterwakilan bagi kelompok marginal, seperti perempuan, pemuda, dan kelompok rentan lainnya. Kuota ini dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa aspirasi semua kelompok masyarakat terakomodasi dalam dokumen RKP-Desa. Selain itu, pendampingan khusus dapat diberikan kepada kelompok-kelompok ini untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menyampaikan usulan.
4. Pemerintah desa perlu memberikan pelatihan kepada aparatur desa dan pendamping desa terkait fasilitasi musyawarah, pengelolaan data, dan analisis kebutuhan masyarakat. Dengan peningkatan kapasitas ini, aparatur desa dapat memimpin musyawarah secara lebih profesional, sehingga menghasilkan keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas.
5. Pemerintah desa perlu memperkuat sistem pengelolaan data untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada informasi yang akurat dan terkini. Penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi berbasis data, dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola dan menganalisis data sosial,

ekonomi, dan infrastruktur desa secara lebih efektif. Data yang akurat juga dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat.

6. Untuk menciptakan sinergi yang lebih baik, pemerintah desa perlu melibatkan ²⁹ semua pihak dalam proses pembangunan, termasuk **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**, **tokoh masyarakat**, dan **kelompok masyarakat lainnya**. Dengan melibatkan semua pihak, pelaksanaan musyawarah dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel, sehingga menciptakan kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat.
7. Pemanfaatan media digital, seperti grup WhatsApp atau platform komunikasi lainnya, dapat menjadi cara untuk menginformasikan masyarakat tentang agenda musyawarah dan memperluas jangkauan sosialisasi. Media ini juga dapat digunakan untuk mengumpulkan masukan masyarakat sebelum musyawarah berlangsung, sehingga memudahkan proses diskusi dan pengambilan keputusan. ²⁷
8. Pemerintah desa perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan musyawarah RKP-Desa. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan dalam pelaksanaan musyawarah ke depan. Selain itu, masyarakat perlu dilibatkan dalam proses evaluasi untuk memastikan bahwa hasil evaluasi mencerminkan realitas di lapangan.

REFERENSI

- Daraba, D. (2017). Pengaruh Program Dana Desa terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Sosiohumaniora*, 19(1), 52–58.
- Isnayanti, K., Maherni, L. B. S., & Irayani, M. P. (2019). Dampak Akuntabilitas Pemerintahan Desa Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Jagaraga). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(2), 109–121.
- Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R. . (2017). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Emba*, 5(6), 1474–1483.
- Melis, Muthalib, A. A., & Apoda. (2016). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara). *Jurnal Ekonomi*, 1(1), 99–105.

- Nur Fitrah, A. M. (2019). Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan di Desa Lombong Kecamatan Malunda Kabupaten Majene. *MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi*, 4(1), 28–43.
- Prasetyo, K. T., Surya, I., & Hasanah, N. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Muarawis Kecamatan Muara Wis kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 6(4), 2041–2054.
- Rahmawati, H. I. (2015). Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman). *The 2nd University Research Coloquium*, 305–313.
- Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606–624.
- Toar, K., Kasenda, V., & Singkoh, F. (2019). Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kawangkoan Utara. *EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–10.
- Wijaya, C., & Rifa'i, M. (2016). *Dasar Dasar Manajemen: Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*. Perdana Publishing.
- Peraturan Perundang-Undangan:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

19%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|-----|
| 1 | Sularso Budilaksono. "Pemenang Hibah Penelitian Dikti tahun Anggaran 2020 sistem filter di MS Excell", Open Science Framework, 2020 | 1 % |
| 2 | Delza Waelaruno, Jenny Matitaputty, Johan Pattiasina. "Tradisi Sou Lavite Dalam Perkawinan Adat Negeri Haruru Kabupaten Maluku Tengah", Lani: Jurnal Kajian Ilmu Sejarah dan Budaya, 2022 | 1 % |
| 3 | www.journal.iaingorontalo.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 4 | www.bestspanishwines.com
Internet Source | 1 % |
| 5 | repository.uir.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 6 | ejournal.uika-bogor.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 7 | repository.ub.ac.id | |

8

Muhammad Syaiful Amin Syam, Erwing Erwing, Muliana Muliana. "IMPLEMENTASI P5 (PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA) MELALUI KEGIATAN ASISTENSI MENGAJAR", Jurnal Inovasi Pendidikan dan Teknologi Informasi (JIPTI), 2024

Publication

9

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

<1 %

10

Submitted to bbgpjateng

Student Paper

<1 %

11

pejambon-bjn.desa.id

Internet Source

<1 %

12

journal.unpas.ac.id

Internet Source

<1 %

13

mojogedang.karanganyarkab.go.id

Internet Source

<1 %

14

sesctv.net

Internet Source

<1 %

15

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1 %

16

core.ac.uk

Internet Source

<1 %

17	jim.unsyiah.ac.id	<1 %
18	repository.uniga.ac.id	<1 %
19	Submitted to Universitas Negeri Makassar	<1 %
20	text-id.123dok.com	<1 %
21	www.coursehero.com	<1 %
22	www.panjimas.com	<1 %
23	Eko Adi Sumitro, Puniman Puniman. "Implementasi Pendidikan Karakter melalui Pembelajaran Sastra di Sekolah Menengah Atas", Jurnal Pendidikan Bahasa, 2024 Publication	<1 %
24	eprints.uny.ac.id	<1 %
25	docplayer.info	<1 %
26	ejurnal.binawakya.or.id	<1 %
27	www.bhuanajaya.desa.id	<1 %

28	www.kabupatenbogor.web.id Internet Source	<1 %
29	Adnan H., Tadjudin D., Yuliani L., Komarudin H., Lopulalan D., Siagian Y., Munggoro D., (eds.). "Belajar dari Bungo: mengelola sumberdaya alam di era desentralisasi", Center for International Forestry Research (CIFOR), 2008 Publication	<1 %
30	doaj.org Internet Source	<1 %
31	efbhis.bhinneka.com Internet Source	<1 %
32	kedirikab.go.id Internet Source	<1 %
33	kkn.undip.ac.id Internet Source	<1 %
34	pgsd.unsam.ac.id Internet Source	<1 %
35	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
36	Arwanto Harimas Ginting, Ida Widianingsih, Rahman Mulyawan, Heru Nurasa. "Village Government's Risk Management and Village	<1 %

Fund Administration in Indonesia", Sustainability, 2023

Publication

-
- 37 Asri Yanti Yanti, Arsidik Asuru Asuru, Andi Syahrir P. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA (Studi di Desa Banga Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah)", SELAMI IPS, 2019 <1 %
Publication
-
- 38 digilib.uin-suka.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 39 ejurnal.unesa.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 40 fiskal.kemenkeu.go.id <1 %
Internet Source
-
- 41 garuda.kemdikbud.go.id <1 %
Internet Source
-
- 42 jurmafis.untan.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 43 repository.unpar.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 44 simlit.puspjak.org <1 %
Internet Source
-
- 45 www.bulog.co.id <1 %
Internet Source
-

46	www.scribd.com Internet Source	<1 %
47	Jhon Paul Elison, Jhony Fredy Hahury. "IMPLEMENTASI FUNGSI KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN", FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang, 2023 Publication	<1 %
48	docobook.com Internet Source	<1 %
49	www.bangkalankab.go.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches Off